

ABSTRAK

THE EFFECT OF THE VILLAGE GOVERNMENT APPARATUS ROLE AND THE SOCIETY PBB UNDERSTANDING TO THE AWARENESS OF PAYING PBB

(Rio Teguh Setyono, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi)

The aim of this research was to explain the effect of the village government role and the understanding of society about PBB to the awareness of PBB paying in Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2015. The method of this research was quantitative associative with ex-post-facto descriptive approach to the 52 respondents. The data collecting techniques were using questionnaire analysis technique using regression.

According to the results analysis and hypothesis testing, it showed that: 1. There is an effect of village government role to the contributes to society awareness of PBB paying about 93%. 2. There is an effect of society understanding about PBB to society awareness of PBB paying about 30 %. 3. There is an effect of village government role and society understanding about PBB to society awareness of PBB paying about 95 %.

Keywords: village government apparatus, society awareness, understanding.

ABSTRAK

PENGARUH APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PBB

(Rio Teguh Setyono, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh peran aparatur pemerintah desa dan pemahaman masyarakat tentang PBB terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif asosiatif dengan pendekatan deskriptif ex post facto yang sampel penelitian berjumlah 52 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan teknik analisis data menggunakan regresi.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis menunjukkan bahwa: 1. Terdapat pengaruh peran aparatur pemerintah desa terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB sebesar 93%. 2. Terdapat pengaruh pemahaman masyarakat tentang PBB terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB sebesar 30%. 3. Terdapat pengaruh peran aparatur pemerintah desa dan pemahaman masyarakat tentang PBB terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB sebesar 95%.

Kata kunci : *aparatur pemerintah desa, kesadaran masyarakat, pemahaman.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warganegara dan salah satu tujuannya adalah mensejahterakan rakyatnya yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar tersebut antara lain dibangun fasilitas umum untuk masyarakat atau struktur seperti gedung-gedung, jalan, irigasi, lembaga ekonomi, dan lain-lain. Bangunan tersebut tersedia dari pemerintah atas pemungutan negara. Antara lain adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan “adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” (pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1994).

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program pajak bumi dan bangunan ini antara lain perlu diadakannya sosialisasi atau penyuluhan bahwa pajak bumi dan bangunan ini sangatlah berguna untuk kemajuan daerah itu sendiri dan peran pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang sadar akan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di lingkungan 2 kelurahan mulya asri dan hasil wawancara terhadap sekretaris lurah yang mengurus pajak bumi dan bangunan serta masyarakat sekitar, dapat dilihat jumlah wajib pajak adalah 855 kepala Keluarga wajib pajak dan 340 kepala

keluarga wajib pajak yang telah membayar pajak atau sekitar 39,8 %, kemudian yang belum membayar pajak bumi dan bangunan ada 515 kepala keluarga wajib pajak atau sekitar 60,2 %. Sehingga dari data tersebut dapat dikatakan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB masih belum maksimal. Padahal jelas sekali bahwa membayar PBB merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk membayarnya. Selanjutnya batas dari pemungutan pajak itu berakhir di bulan oktober sehingga sebagian masyarakat menjadi lupa atau menyampingkannya pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut. Peran aparat pemerintah desa disini masih sangat minim sekali untuk memberikan pemahaman terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan, seharusnya aparat pemerintah desa sendiri sudah selayaknya memberikan penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakatnya agar dapat meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan yang berguna untuk rakyat indonesia pada umumnya dan warga mulya asri sendiri pada khususnya.

Sebagaimana diketahui bahwa membayar pajak bumi dan bangunan berfungsi sebagai sumber dana untuk pembangunan yang berguna membangun daerah itu sendiri agar lebih maju dan terpenuhi sarana dan prasarana. Jadi seharusnya baik pemerintah dan masyarakat agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pemahaman wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor dari banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai

pemahaman tinggi/positif mengenai peraturan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib pajak yang mempunyai pemahaman yang rendah/negatif cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh. Mengingat pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban warganegara yang harus dilaksanakan setiap satu tahun sekali, maka upaya pemerintan dalam hal ini wajib didukung oleh semua pihak termasuk wajib pajak. Oleh karena itu peneliti perlu memandang penelitian tentang Pengaruh Peran Aparatur Pemerintah Desa dan Pemahaman Masyarakat Tentang PBB Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015.

Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh peran aparatur pemerintah desa terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
2. Apakah terdapat pengaruh pemahaman masyarakat terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
3. Apakah terdapat besar pengaruhnya dari pemerintah terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak bumi

dan Bangunan (PBB) di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

Tinjauan Tentang Kesadaran

Menurut Soekanto (2002) menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).

Tinjauan Tentang Masyarakat

Menurut Abdul Syani (2007: 30) bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang; *pertama*, memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun, atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Di samping itu dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. *Kedua*, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses (*nya*) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan, atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.

Tinjauan Tentang Kesadaran Masyarakat Membayar PBB

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan sikap dan perilaku yang ditunjukkan secara wajar oleh seseorang (manusia) secara umum, sebagai bentuk kesadaran pada adanya pemahaman terhadap pajak, yang didasarkan karena adanya hak dan kepentingan manusia tentang apa arti dan seharusnya pajak itu, dan bagaimana mematuhi maupun mentaati hukum tanpa harus ada unsur paksaan. Dan dalam hal ini Soekanto, (1982:125-256, 1983:96) mengemukakan empat indikator

tentang kesadaran membayar pajak yaitu:

1. Pengetahuan tentang pajak,
2. Pemahaman tentang pajak,
3. Sikap terhadap pajak, dan
4. Perilaku pajak.

Tinjauan Tentang Pemerintah Desa

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara seperti diatur dalam konstitusi suatu negara.

Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja, sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi yakni aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk bukan dipilih. Kemudian pemerintah menurut Syafie (2002: 11) "Suatu ilmu dan seni". Jadi pemerintah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Tinjauan Tentang Aparatur Desa

Menurut pasal 202 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) "Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga, dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintah desa".

Tinjauan Tentang Pemahaman Masyarakat Tentang PBB

Menurut Rakhmat dalam Ades Putri Pertiwi (2014: 56) "pemahaman adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia". Pengertian ini menunjukkan bahwa aspek pemahaman erat kaitannya dengan sikap intelektual dan ini berkaitan dengan apa yang diketahui oleh manusia.

Kesimpulan bahwa pengertian pemahaman adalah mengerti atau dapat menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, sebab apa, bagaimana, dan untuk apa. Pemahaman masyarakat tentang PBB adalah sejauh mana masyarakat mengetahuinya atau paham tentang pajak bumi dan bangunan dan mengerti atau dapat menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, sebab apa, bagaimana, dan untuk apa pembayaran PBB itu digunakan oleh pemerintah.

Tinjauan Tentang Pajak

Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro dalam Adrian Sutedi (2011: 1) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban negara untuk menyetorkan sejumlah

penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Tinjauan Tentang PBB

Pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam Adrian Sutedi, S.H., M.H., (2011: 116) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif asosiatif dan jenis penelitian ini adalah *ex post facto*

Populasi

populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) wajib pajak terutama yang belum sadar pajak (yang belum membayar pajak) di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014. Untuk lebih jelasnya, berikut data populasi dalam penelitian seperti terlihat pada tabel:

Tabel 3.1. Jumlah Wajib Pajak di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

No	Tempat	Wajib Pajak	Sadar Pajak (yang telah membayar pajak)	Belum Sadar Pajak (yang belum membayar pajak)
1	RT 01	90 KK	65 KK	25 KK
2	RT 02	97 KK	40 KK	57 KK
3	RT 03	98 KK	45 KK	53 KK
4	RT 04	92 KK	35 KK	57 KK
5	RT 05	96 KK	27 KK	69 KK
6	RT 06	94 KK	15 KK	79 KK
7	RT 07	93 KK	30 KK	63 KK
8	RT 08	97 KK	25 KK	72 KK
9	RT 09	98 KK	58 KK	40 KK
Jumlah		855 KK	340 KK	515 KK

Sumber: Data Arsip Kelurahan Mulya Asri

Sampel

Karena populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 maka sampel di ambil sebanyak 10% dari 515 total populasi. Sehingga diperoleh sampel 52 orang kepala keluarga.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pokok (Angket)
2. Teknik Penunjang (Wawancara, Dokumentasi, Observasi)

HASIL PENELITIAN DAN

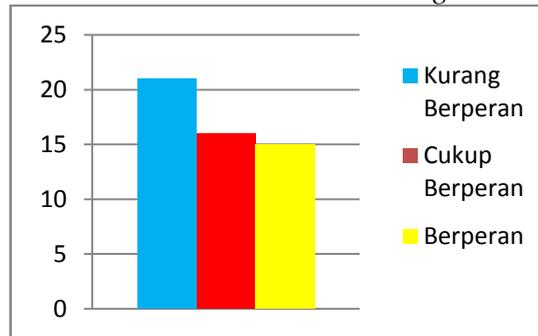
PEMBAHASAN

1) Indikator Sosialisasi Tentang PBB

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi indikator sosialisasi tentang PBB

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	4 – 5	21	40,4 %	Kurang berperan
2.	6 – 7	16	30,8 %	Cukup berperan
3.	8 – 9	15	28,8 %	Berperan
Jumlah		52	100 %	

2. Sumber: Data analisis hasil sebaran angket



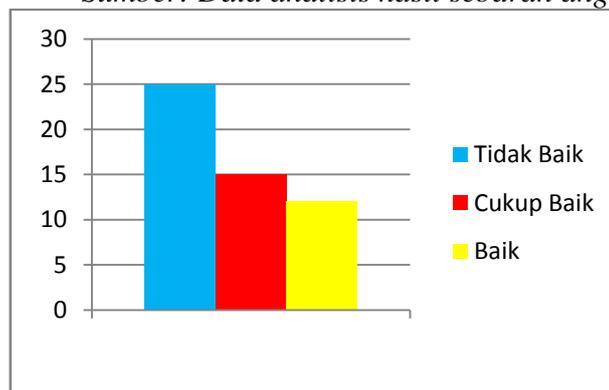
1.1 Histogram Sosialisasi Tentang PBB

2) Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	3 - 4	25	48,1 %	Tidak Baik
2.	5 - 6	15	28,8 %	Cukup Baik
3.	7 - 9	12	23,1 %	Baik
Jumlah		52	100 %	

Sumber: Data analisis hasil sebaran angket



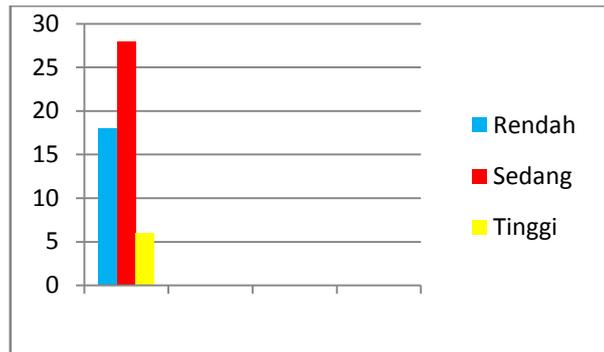
1.2 Histogram Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

3) Peran Aparatur Pemerintah Desa (X₁)

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi Peran Aparatur Pemerintah Desa

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	7-10	18	34,6 %	Rendah
2.	11-14	28	53,8 %	Sedang
3.	15-18	6	11,6 %	Tinggi
Jumlah		52	100 %	

Sumber: Data analisis hasil sebaran angket



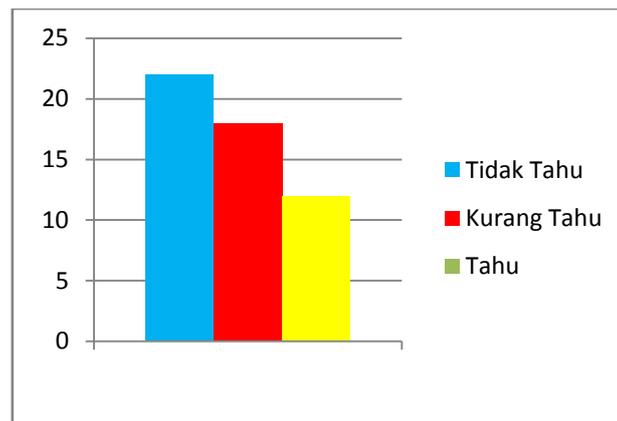
1.3 Histogram Peran Aparatur Pemerintah Desa

4) Indikator Dasar Pengenaan PBB

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi indikator Dasar Pengenaan PBB

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	4 - 5	22	42,3 %	Tidak tahu
2.	6 - 7	18	34,6 %	Kurang tahu
3.	8 - 9	12	23,1 %	Tahu
Jumlah		52	100 %	

Sumber: Data analisis hasil sebaran angket



1.4 Histogram Dasar Pengenaan PBB

5) Indikator Pemahaman Masyarakat Tentang Mekanisme Pembayaran PBB

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman Masyarakat Tentang Mekanisme Pembayaran PBB

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	3 - 4	18	34,6 %	Tidak Paham
2.	5 - 6	20	38,4 %	Kurang Paham
3.	7 - 9	14	27 %	Paham
Jumlah		52	100 %	

Sumber: Data analisis hasil sebaran angket



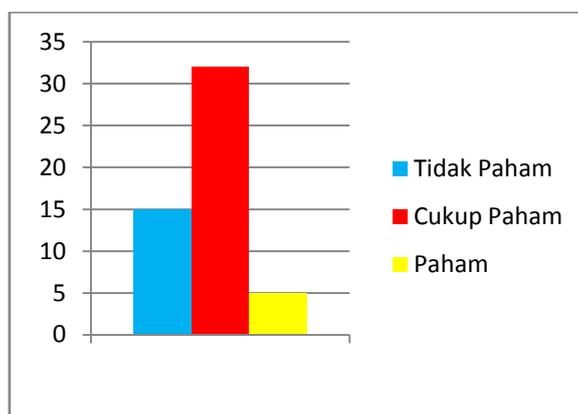
4.5 Histogram Pemahaman Masyarakat Tentang Mekanisme Pembayaran PBB

6) Pemahaman Masyarakat Tentang PBB (X₂)

Tabel 4.7 Distribusi frekuensi Pemahaman Masyarakat Tentang PBB (X₂)

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	7-10	15	28,8 %	Tidak Paham
2.	11-14	32	61,4 %	Cukup Paham
3.	15-18	5	9,8 %	Paham
Jumlah		52	100 %	

Sumber: Data analisis hasil sebaran angket



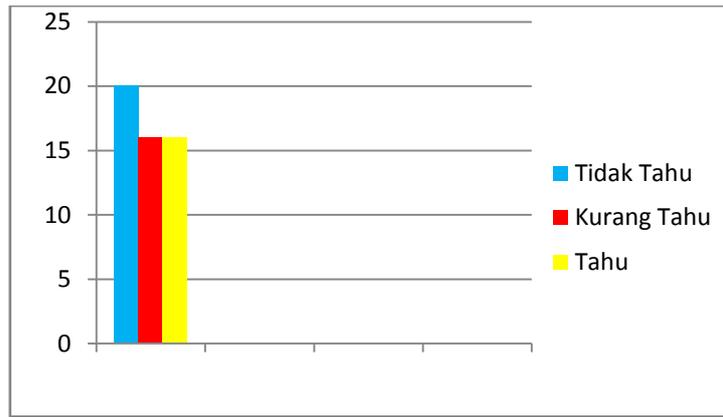
1.5 Histogram Pemahaman Masyarakat Tentang PBB

7) Indikator Pengetahuan Masyarakat

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Indikator Pengetahuan Masyarakat

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	4-5	20	38,4 %	Tidak tahu
2.	6-7	16	30,8 %	Kurang tahu
3.	8-9	16	30,8 %	Tahu
Jumlah		52	100 %	

Sumber: Data analisis hasil sebaran angket



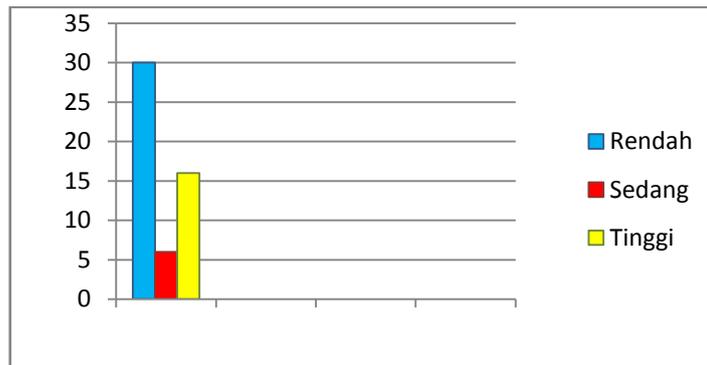
1.6 Histogram Pengetahuan Masyarakat

8) Indikator Sikap Masyarakat

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Sikap Masyarakat

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	3 - 4	30	57,7 %	Rendah
2.	5 - 6	6	11,5 %	Sedang
3.	7 - 9	16	30,8 %	Tinggi
Jumlah		52	100 %	

Sumber: Data analisis hasil sebaran angket



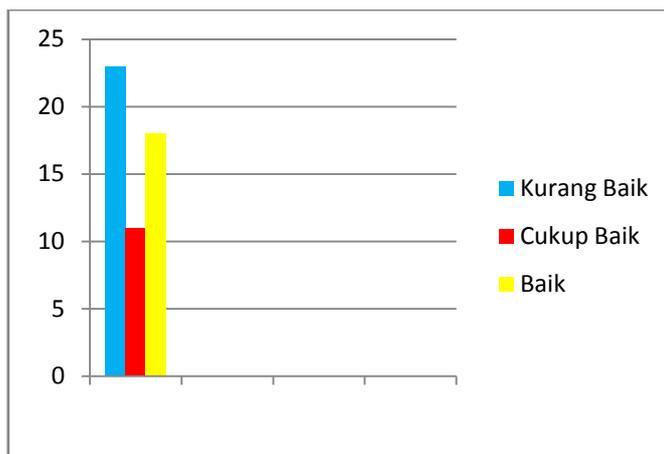
1.7 Histogram Sikap Masyarakat

9) Indikator Pola Perilaku Masyarakat

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Indikator Pola Perilaku Masyarakat

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	4	23	44,2 %	Kurang Baik
2.	5	11	21,2 %	Cukup Baik
3.	6	18	34,6 %	Baik
Jumlah		52	100 %	

Sumber: Data analisis hasil sebaran angket



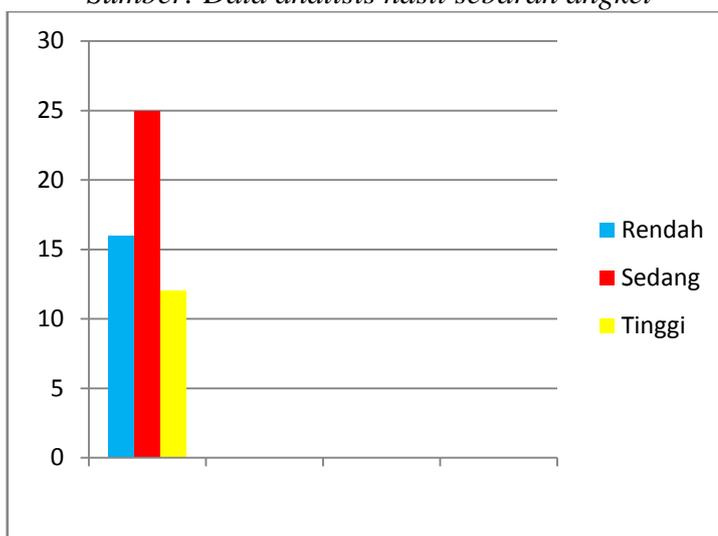
1.8 Histogram Pola Perilaku Masyarakat

10) Kesadaran Masyarakat Tentang PBB (Y)

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Kesadaran Masyarakat Membayar PBB

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	11-14	15	28,8 %	Rendah
2.	15-18	25	48,1 %	Sedang
3.	19-22	12	23,1 %	Tinggi
Jumlah		52	100 %	

Sumber: Data analisis hasil sebaran angket



4.6 Histogram Kesadaran Masyarakat Membayar PBB

Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Peran Aparatur Pemerintah Desa (X_1) Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB (Y)

Tabel 4.12 Uji Korelasi Variabel X_1 Terhadap Y
Correlations

		Y	X1
Pearson Correlation	Y	1.000	0.304
	X1	0.304	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.014
	X1	.014	.
N	Y	52	52
	X1	52	52

Tabel 4.13 Uji Persamaan Regresi Variabel X_1 Terhadap Y

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.388	1.768		7.008	0.000
X1	0.342	0.151	0.304	2.258	0.028

Tabel 4.14 Uji Determinasi Variabel X_1 Terhadap Y
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.304 ^a	0.93	0.074	2.70338

2. Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang PBB (X_2) Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB (Y)

Tabel 4.15 Uji Korelasi Variabel X_2 Terhadap Y
Correlations

		Y	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	0.173
	X2	0.173	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	0.110
	X2	0.110	.
N	Y	52	52

Tabel 4.16 Uji Persamaan Regresi Variabel X₂ Terhadap Y
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.135	1.777		7.952	0.000
X2	0.186	0.150	0.173	1.242	0.220

Tabel 4.17 Uji Determinasi Variabel X₂ Terhadap Y
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.173 ^a	0.30	0.011	2.79509

3. Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Tabel 4.18 Uji Korelasi Dan Determinasi Variabel X₁ dan X₂ Terhadap Model
Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.308 ^a	0.95	0.58	2.72690

Tabel 4.19 Uji Regresi Variabel X₁ dan X₂ terhadap Y
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	38.309	2	19.155	2.576	0.000 ^b
Residual	364.364	49	7.436		
Total	402.673	51			

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data yang telah diuraikan mengenai pengaruh peran aparatur pemerintah desa dan pemahaman masyarakat tentang PBB terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat pengaruh peran aparatur pemerintah desa terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB. Ini berarti semakin besar peran aparatur pemerintah desa, maka semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.

Terdapat pengaruh pemahaman masyarakat tentang PBB terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB. Ini berarti semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang PBB, maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.

Terdapat pengaruh peran aparatur pemerintah desa dan pemahaman masyarakat tentang PBB terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB. Ini berarti semakin besar peran aparatur pemerintah desa dan tingginya pemahaman masyarakat tentang PBB, maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dan sebaliknya, semakin rendah peran aparatur pemerintah desa dan semakin rendahnya pemahaman masyarakat tentang PBB maka semakin rendah pula kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh peran aparatur pemerintah desa dan pemahaman masyarakat tentang PBB terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

Kepada Aparatur Pemerintah Desa
Aparatur pemerintah desa akan lebih baik lagi apabila meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan yaitu dengan melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada warganya agar masyarakat lebih paham dan dapat membantu terlaksananya program-program pemerintah.

Kepada Masyarakat
Masyarakat hendaknya harus lebih sadar akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembayaran PBB tersebut dan juga sebagai warganegara yang baik dapat membantu program pemerintah agar berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Pertiwi, AP. 2014. *Pengaruh Pemahaman dan Sikap Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Tingkat Pelayanan Publik di Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2014*. (Skripsi). Universitas Lampung: Bandar Lampung
- Soekanto, S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sutedi, A. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika

- Syafiie. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta
- Syani, A. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.32 Indonesia pasal 202 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Visi Media